KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ada Tambahan Rp 740 Miliar
Tanggal : Senin, 26 Oktober 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 17

Ada Tambahan Rp 740 Miliar

Permintaan DPR dalam RAPBN 2016 Disepakati Panitia Kerja

JAKARTA, KOMPAS – Dewan Perwakilan Rakyat meminta tambahan anggaran Rp 740 miliar untuk dialokasikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Hal ini telah disepakati dalam pembahasan panitia kerja yang melibatkan Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan.

Anggaran tersebut dikategorikan sebagai belanja prioritas. Namun, belum ada kejelasan mengenai programnya.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menyampaikan hal itu di Jakarta, Minggu (25/10). Roy menduga anggaran itu untuk keperluan pembangunan gedung.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, ada kesepakatan mengenai tambahan anggaran untuk DPR sebesar Rp 740 miliar. Namun, Askolani mengaku tidak mengetahui peruntukannya. Sebab, sesuai ketentuan, detail penggunaan anggaran dibahas Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, bukan oleh Badan Anggaran DPR.

"Pembahasan di Badan Anggaran DPR sebatas menetapkan pagu belanja. Detailnya dibahas BURT. Usulan DPR semula malah di atas Rp 2 triliun," kata Askolani.

DPR memiliki rencana untuk menata kompleks parlemen, terdiri atas tujuh proyek. Total anggarannya diperkirakan Rp 1,6 triliun, yang akan dikerjakan bertahap selama beberapa tahun mendatang.

Semula, DPR akan memasukkan usulan anggaran Rp 600 miliar sampai Rp 700 miliar dalam RAPBN 2016 untuk pembangunan gedung baru, khususnya ruang kerja anggota DPR dan alun-alun demokrasi. Namun, setelah mendapat kritik deras dari masyarakat, usulan ini akhirnya tak diakomodasi dalam RAPBN 2016.

Menjelang akhir pembahasan RAPBN 2016, DPR tiba-tiba mengusulkan anggaran senilai Rp 740 miliar dan akhirnya mendapatkan alokasi tersebut.

Belum tahu

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Syaifullah Tamliha, menyatakan belum mengetahui keperluan tambahan anggaran yang nilainya besar tersebut.

"Saya tidak tahu urgensi apa untuk menambah anggaran tersebut. Sepanjang tidak transparan, tidak akuntabel, tidak sesuai tata kelola, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pemerintah dan Badan Anggaran DPR sebaiknya kembali ke nota keuangan saja," kata Syaifullah.

Dalam nota keuangan RAPBN 2016, di luar tambahan anggaran belanja prioritas sebesar Rp 740 miliar itu, DPR mendapat alokasi belanja Rp 4,66 triliun.

Anggaran tersebut terbagi untuk enam program satuan dua. Pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya senilai Rp 663,56 miliar. Kedua, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur senilai Rp 563,66 miliar. Ketiga, program pelaksanaan fungsi legislasi sebesar Rp 332,5 miliar.

Program keempat adalah pelaksanaan fungsi anggaran Rp 81,84 miliar. Kelima, program fungsi pengawasan Rp 335,4 miliar. Adapun program yang keenam adalah penguatan kelembagaan senilai Rp 2,68 triliun.

Sebelumnya, DPR gagal mengusulkan dana aspirasi untuk daerah pemilihan masuk dalam RAPBN 2016. Dalam usulan tersebut, ada jatah Rp 15 miliar per anggota DPR. Usulan ini mental dari RAPBN 2016 karena hujan kritik dari masyarakat.

Namun, belakangan DPR diam-diam juga memasukkan rumusan tambahan pada Pasal 1 RUU RAPBN 2016. Inti rumusan tambahan itu adalah pengusulan dana alokasi khusus (DAK) fisik harus melalui usulan DPR.

Jika rumusan tambahan ini lolos, DAK fisik senilai Rp 91,7 triliun harus sesuai usulan DPR. Bahkan, DAK reguler senilai Rp 57,57 triliun yang porsinya paling besar dari total DAK fisik itu harus melalui usulan DPR.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sudah menegaskan akan mengusulkan pencabutan rumusan titipan DPR soal mekanisme usulan DAK itu.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo menyatakan, parlemen tak memiliki kewenangan untuk mengusulkan program. DPR bertugas membahas, kemudian menyampaikan pertimbangan dan masukan terhadap usulan pemerintah sampai pada kesimpulan dan kesepakatan bersama. (LAS)